

# BAB I

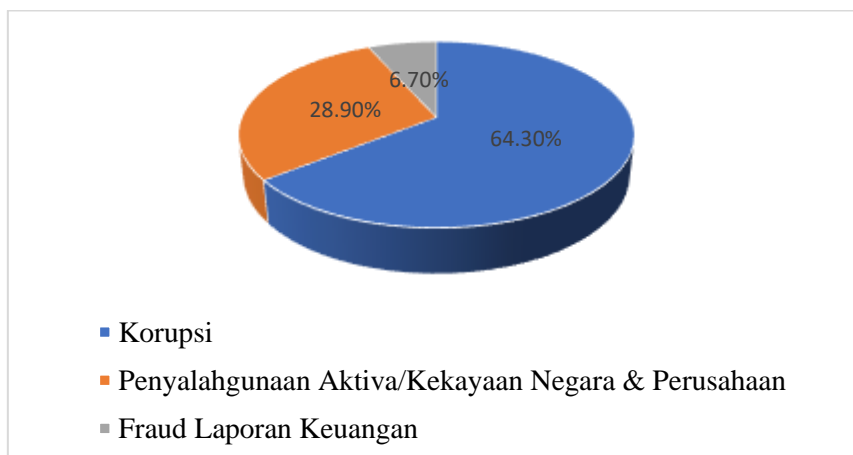
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

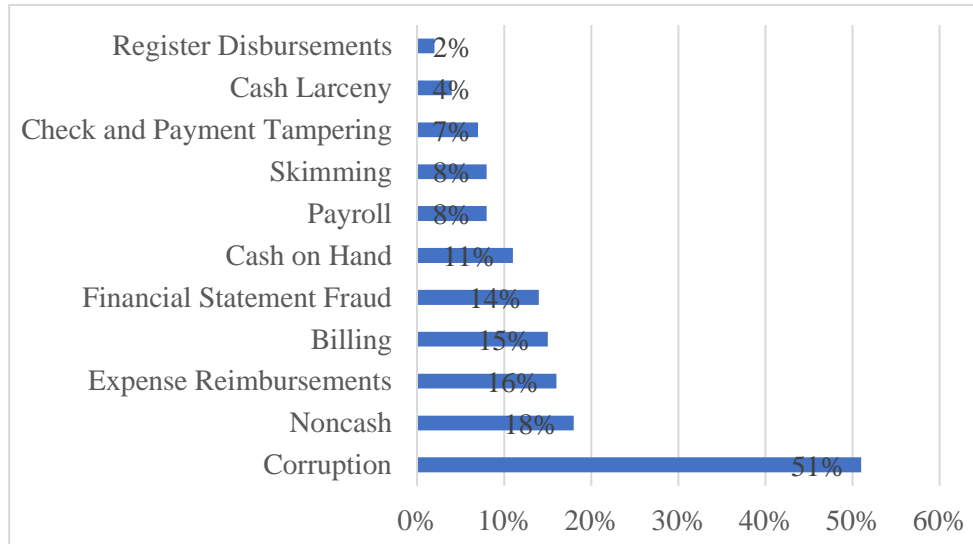
Kecurangan yaitu aktivitas yang dapat merugikan. Kecurangan dapat terjadi pada berbagai bentuk organisasi baik perusahaan, organisasi non profit, maupun pemerintah (Zack, 2013). Kecurangan berdasarkan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) terdapat 3 fraud antara lain kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi yang dikenal dengan istilah fraud tree. Tindakan kecurangan semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman (Zabihollah Rezaee, 2010). Menurut laporan dari ACFE, 2020 bahwa tindakan yang paling banyak terjadi yaitu korupsi di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 51%. Laporan ACFE Indonesia, 2019 menyebutkan bahwa tindakan korupsi merupakan kecurangan yang banyak terjadi di Indonesia yaitu 64,4%.

**Gambar 1 1**

#### Fraud paling banyak terjadi di Indonesia



*Sumber: ACFE Indonesia 2019*

**Gambar 1 2****Skema penipuan pekerjaan yang paling umum di kawasan Asia-Pasifik**

*Sumber: The ACFE's 11<sup>th</sup> - Report to the Nations 2020*

Berdasarkan survey dari Transparency International 2021 pada data *Corruption Perception Index* (CPI) 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 pada skala 100-0 (100 artinya bersih dan 0 berarti korup) menjadikan Indonesia pada urutan 96 dari 180 negara yang mana Indonesia berada pada zona merah dengan tingkat korupsi yang tinggi. Laporan Indonesia Corruption Watch, 2021 menunjukkan akibat tindakan korupsi Indonesia mengalami kerugian pada semester 1 tahun 2021 sebesar Rp 26,83 triliun, jumlah kerugian negara akibat korupsi naik 47,63% dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama yaitu sebesar Rp 18,17 triliun.

Tindakan kecurangan berupa korupsi merupakan suatu tantangan utama yang dihadapi oleh dunia (Golden et al., 2006). Korupsi itu sendiri merupakan tindakan kecurangan yang melibatkan lebih dari dua orang (Singleton & Singleton, 2011). Tindakan korupsi yang dilakukan merupakan suatu penyakit sosial yang

berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat, korupsi mengajarkan penyimpangan pada cara yang tidak bermoral dan melanggar hukum (Golden et al., 2006). Mekanisme korupsi yang paling umum *bribes* dan *kickbacks* merupakan tindakan kecurangan korupsi sangat sulit untuk dideteksi (Golden et al., 2006). Oleh karena itu, pencegahan dan pengungkapan pada kasus ini dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian untuk mengatasi risiko terjadinya tindakan korupsi di negara berkembang maupun negara maju, meskipun untuk kasus korupsi paling banyak terjadi yaitu di negara berkembang dibandingkan negara maju (Brody et al., 2020).

**Gambar 1 3**

**Kasus Menurut Negara Di Kawasan Asia- Pasifik**

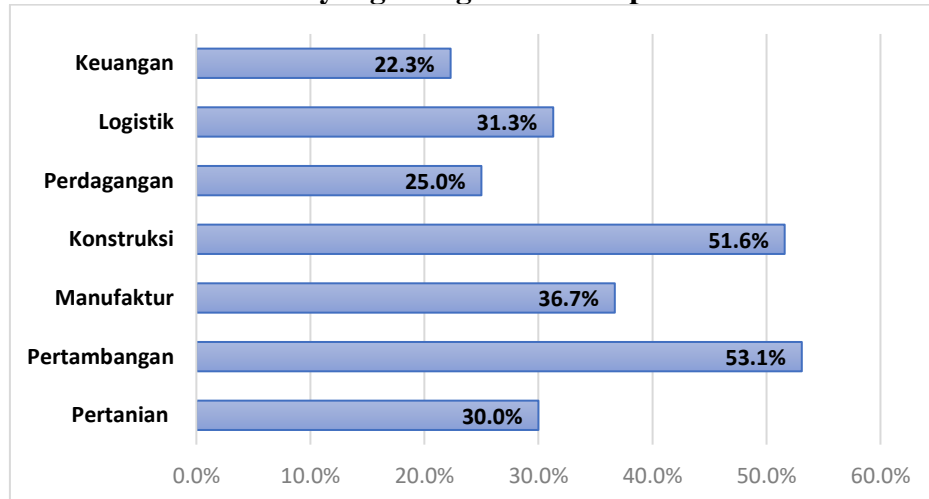
<b>Country</b>	<b>Number of Cases</b>
Indonesia	36
China	33
Australia	29
Philippines	24
Malaysia	19
Singapore	17
Hong Kong	11
Japan	8
Thailand	6
South Korea	5
New Zealand	3
Taiwan	2
Vietnam	2
Laos	1
Macau	1
Myanmar (Burma)	1
<b>Total Cases:</b>	<b>198</b>

*Sumber: The ACFE's 11th - Report to the Nations 2020*

Indonesia menduduki urutan pertama untuk jumlah kasus fraud terbanyak terjadi untuk Kawasan Asia Pasifik (ACFE, 2020). Berdasarkan survei dari *Paying*

*bribes in Indonesia: A survey of business corruption* yang dilakukan oleh Kenny & Warburton, 2021 menyatakan sektor pertambangan menjadi kasus korupsi banyak terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di sektor pertambangan di Indonesia seperti yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia seperti perusahaan yang memberi suap dan gratifikasi kepada mantan bupati Mardani Maming di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terkait usaha pertambangan (Harjanto, 2022). Selanjutnya ada juga kasus korupsi yang melibatkan Mantan Dirut Aneka Tambang (Antam) Alwinskyah Lubis dihukum 6 tahun penjara karena kasus korupsi yang merugikan Antam Rp 92 miliar (Saputra, 2022). Kasus-kasus yang terjadi tersebut diakibatkan oleh terdapat lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan pengawasan dan sistem pengendalian internal yang masih perlu diperkuat (Kenny & Warburton, 2021) dan keterbukaan informasi.

**Gambar 1 4**  
**Persentase Perusahaan yang Mengalami Korupsi Berdasarkan Sektor**



*Sumber:* Kenny & Warburton (2021)

Pada laporan dari ACFE, 2020 menyatakan bahwa tindakan fraud terjadi di Kawasan Asia pasifik disebabkan karena terdapat lemahnya pengawasan dari

komite audit sebesar 84%, dan pengendalian internal yang lemah juga menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan berdasarkan laporan ACFE 2020 menunjukkan sebesar 31% terjadinya kecurangan diakibatkan oleh pengendalian internal yang lemah. Untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap kasus korupsi tentu dibutuhkan suatu komite audit dan sistem pengendalian internal efektif yang mampu melakukan pencegahan tindakan kecurangan seperti korupsi.

Pencegahan dan mengurangi terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan sistem pengendalian internal yang baik dan komite audit mampu menurunkan kemungkinan korupsi yang dilakukan (Gorshunov et al., 2021). Sehingga diperlukan pemantauan dan pengendalian yang efektif dan efisien dari komite audit untuk memastikan penerapan manajemen dan pengungkapan sistem pengendalian internal perusahaan (Pangaribuan et al., 2019). Pengungkapan anti korupsi juga berpengaruh pada kepercayaan dari para pengguna dari laporan keuangan terkait sistem pengendalian internal yang dilakukan didalam perusahaan (Brazel et al., 2015).

Tindakan korupsi terjadi karena pengendalian internal yang belum berjalan karena hanya berfokus pada kepentingan eksternal dengan perusahaan menghasilkan dua laporan yang berbeda untuk perusahaan dan pemangku kepentingan sehingga diperlukan suatu langkah perbaikan pada sistem pengendalian internal untuk menghindari tindakan tersebut (Blanc et al., 2019). Sistem pengendalian internal berpengaruh positif untuk pengungkapan kecurangan dengan adanya pengungkapan antikorupsi (Putri, 2020; Rahmi & Sovia, 2017; Wibowo & Kristanto, 2017). Pengungkapan anti korupsi yaitu salah satu bentuk

kebijakan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan untuk dapat merepresentasikan komitmen perusahaan untuk memerangi korupsi, langkah ini diambil oleh perusahaan untuk memenuhi komitmen perusahaan dan memberitahu para *stakeholder* nya bahwa perusahaan menjalankan bisnis yang beretika (Crain et al., 2015). Pengungkapan anti korupsi dapat dijalankan dengan baik dengan pengendalian internal yang dijalankan secara baik.

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk dapat membantu dalam melakukan pencegahan, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi (Graham, 2008). Sehingga apabila suatu pengendalian internal yang baik dijalankan maka pengungkapan kecurangan dapat semakin banyak diungkapkan, dan sebaliknya apabila pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik maka pengungkapan sedikit dilakukan (Hightower, 2005). Upaya untuk pengungkapan anti korupsi, komite audit berperan sebagai pengawas di dalam suatu perusahaan yang dapat membantu dalam upaya untuk melakukan pengungkapan pada tindakan korupsi yang terjadi sehingga dapat menghindari dari adanya tindakan korupsi yang terjadi (Joseph et al., 2016; Utami et al., 2019). Komite audit memastikan pengungkapan yang lebih baik dan memastikan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan kuat serta mampu memastikan bahwa pengungkapan kecurangan dalam laporan perusahaan (Haldar & Raithatha, 2017). Sedangkan menurut penelitian lainnya berpendapat bahwa bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh dalam upaya pengungkapan korupsi, kepatuhan dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mampu membantu pengungkapan terhadap korupsi (Asiedu & Deffor, 2017). Pada penelitian Salehi & Shirazi, 2016

menunjukkan bahwa komite audit tidak memberikan dampak dalam melakukan fungsi pengawasan untuk pengungkapan kecurangan yang terjadi didalam perusahaan.

Komite audit membutuhkan suatu independensi dari manajemen sehingga mampu untuk melakukan pengungkapan dan pemantauan pada suatu kecurangan yang dapat terjadi di perusahaan, dengan komite audit yang efektif diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal untuk menjalankan pengungkapan terhadap kecurangan dengan lebih baik (Karamanou & Vafeas, 2005). Dengan demikian, mengoptimalkan komite audit dengan efisien dan sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pengungkapan anti korupsi yang ada di suatu perusahaan.

Temuan masalah dan penelitian terdahulu bahwa sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi dengan variabel moderasi komite audit adalah sesuatu yang menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi dengan variabel moderasi komite audit yang terjadi di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, sehingga didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi ?
2. Apakah komite audit memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, sehingga tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi dengan komite audit sebagai pemoderasi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan anti korupsi dengan komite audit sebagai variabel moderasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dengan memperkuat efektivitas komite audit yang ada di perusahaan dengan melakukan pengungkapan anti korupsi



2. Manfaat praktis yang didapatkan di dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu saran bagi para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan untuk dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini memiliki sistematika penulisan yang disusun mulai dari bagian pendahuluan ini dilanjutkan dengan tinjauan pustaka dan metode penelitian. Setelah rencana penelitian ini dilakukan, penulisan akan dilanjutkan mengenai hasil dan pembahasan, sampai pada kesimpulan dan saran.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini terkait dengan teori digunakan, literatur sebelumnya digunakan untuk dasar di penelitian ini, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, prosedur penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menguraikan data deskripsi hasil pengumpulan data, termasuk data deskripsi karakteristik subjek penelitian, hasil uji yang telah dilakukan, serta pembahasan dari uji yang dilakukan terkait penelitian terdahulu dan teori.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dan implikasi, keterbatasan penelitian yang dapat menjelaskan arah dilakukan penelitian untuk penelitian selanjutnya.